

KERUSUHAN AMBON DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Oleh :

Drs. H. D. Brototanojo

I. PENDAHULUAN.

Kota Ambon sebagai ibukota propinsi Maluku mempunyai fungsi yang sentral dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik bagi propinsi Maluku. Sebagai ibukota propinsi di satu pihak, kota Ambon merupakan kepanjangan tangan sistem nasional yang berpusat di Jakarta dan di pihak lain merupakan puncak dari berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan politik masyarakat Maluku. Sebagai sebuah propinsi yang terbuka untuk semua warga masyarakat Indonesia, kota Ambon juga mempunyai posisi sentral dalam berbagai peredaran sosial, ekonomi dan politik dari masyarakat-masyarakat lokal setempat dari propinsi-propinsi yang terletak disekelilingnya terutama dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Posisi sentral kota Ambon adalah sejalan dengan model Pemerintahan Orde Baru yang sentralistik yang memungkinkan sistem politik nasional Jakarta secara langsung turut campur tangan dalam berbagai kepentingan dan kebijaksanaan internal propinsi, kabupaten, kecamatan dan bahkan sampai ke desa. Sadar atau tidak sadar khususnya dalam pengaturan pemerintahan desa dengan diberlakukannya Undang-undang No. 5/1979 telah menghancurkan Hak Budaya Komuniti dan merubah berbagai pola kebudayaan Ambon yang dalam tradisinya menekankan persatuan dan kesatuan serta kemajemukan. Berbagai kebijaksanaan tingkat propinsi lebih banyak ditentukan oleh selera politik dari pusat/Jakarta dan untuk kepentingan

nasional Jakarta model kebijaksanaan seperti ini dengan sendirinya tidak atau kurang menguntungkan pembangunan sosial, ekonomi dan politik masyarakat setempat. Sayangnya model kebijaksanaan yang sentralistik tersebut tidak mungkin ditentang oleh masyarakat setempat untuk dirubah menjadi Berorientasi pada kepentingan propinsi tersebut. Hal tersebut karena pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan atas kekuasaan yang didukung penuh oleh ABRI dan aparat pemerintahannya. Mekanisme kontrol atas kekuasaan yang dipunyai ABRI dan aparat pemerintahan nasional Indonesia, telah memungkinkan aparat tersebut bergeser posisinya menjadi oknum.

Oknum adalah pejabat atau aparat yang dengan berbagai Jabatannya menggunakan kekuasaan yang dipunyai yang seringkali kekuasaan tersebut berada diatas kekuasaan hukum formal, untuk kepentingan diri sendiri, kerabatnya, kelompoknya atau golongannya. Oknum bermunculan dan menjadi kuat pada saat pranata hukum formal tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam keadaan seperti itu politik golongan menjadi corak yang dominan dalam kehidupan masyarakat kota Ambon sebelum terjadinya kerusuhan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan cara KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Dalam suatu suasana kehidupan perkotaan yang penekanan ekonominya adalah jasa-jasa pelayanan maka bermunculan preman-preman yang seolah-olah berada diatas kekuasaan, hukum hanya

mungkin terjadi apabila ada oknum-oknum yang menjadi patron atau pelindung atau backing mereka. Begitu pula berbagai bentuk pelanggaran undang-undang kependudukan, lingkungan, tertib sosial dan masyarakat serta lembaga tradisi dan konvensi sosial hanya mungkin dapat terwujud bila ada elemen yang menjadi patron atau pelindung. Para oknum atau preman inilah yang secara aktual atau de facto menguasai dan menentukan patokan benar atau salah menurut hukum dan konvensi sosial yang berlaku di kota Ambon dan sekitarnya. Keadilan yang sepihak ini dapat dikatakan membebani dan merugikan masyarakat pada umumnya yaitu mereka yang tidak termasuk didalam golongan oknum dan preman yang berkuasa. Selanjutnya beban sosial mental dan ekonomi yang diderita karena ketidakadilan tersebut dapat mendorong dan membangkitkan perasaan frustrasi sosial, ketidaksukaan, kebencian yang mendalam terhadap preman dan oknum, tanpa berdaya untuk melampiaskannya. Ketidakpuasan, keputusasaan dan kebencian menjadi meruyak dengan melihat kaitan hubungan preman dan oknum dengan sistim politik pada tingkat lokal Ambon dan Maluku dengan sistim nasional, yang mereka rasakan sebagai memihak.

Kerusuhan Ambon yang menurut kalangan umum atau pemerintahan dan birokrat datangnya tidak terduga ternyata telah menjadi peristiwa besar yang telah banyak menelan korban jiwa, harta benda yang tidak terhitung jumlahnya dan telah memporak porandakan segi-segi kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Ambon. Peristiwa yang hanya bermula dari sebuah peristiwa perkelahian biasa di pagi hari menyongsong Hari Raya Idul Fitri tanggal 22 Nopember 1998, dimana ada dugaan dibalik peristiwa tersebut telah terjadi rekayasa politik oleh kelompok tertentu

yang berusaha mengadu domba antar etnis, untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap masalah-masalah yang sedang berkembang di Indonesia pada waktu itu. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai kerusuhan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) yang dimulai dari perkelahian perorangan (antar penduduk lokal dengan penduduk pendatang) yang selanjutnya berubah menjadi perkelahian etnis yang kemudian berkembang menjadi pertentangan golongan/agama (Islam dan Kristen). Hingga saat ini kota Ambon khususnya dan Maluku pada umumnya masih panas dan rawan yang sewaktu-waktu dapat meledak.

Berbagai macam kejadian telah melanda Ambon dan sekitarnya mulai dari pembakaran, pembunuhan, penganiayaan, penyerangan, penjarahan sampai pengungsian telah terjadi disana dan hal tersebut sangat memprihatinkan pemerintah pusat Jakarta sampai pemerintah propinsi dan kabupaten, kecamatan, desa hingga semua masyarakat Indonesia. Selanjutnya Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat telah mengambil tindakan-tindakan dan upaya-upaya pencegahan dan penyidikan dalam rangka menjaga wibawa hukum yang mulai menurun, namun hingga saat ini belum terselesaikan mengingat kota Ambon khususnya dan Maluku pada umumnya hingga saat ini belum aman baik warga asli maupun warga pendatang, maka pemerintah telah memberlakukan jam malam dimana kendali situasi ada ditangan militer, namun saat ini sudah dikembalikan pada posisi darurat sipil dimana kendali keamanan ada ditangan polri kembali.

Dari uraian tersebut diatas permasalahan yang dapat diangkat antara lain :

1. Mengapa kasus kerusuhan Ambon yang semula hanya kasus pribadi dapat

menjadi kerusuhan sosial dan sara ?

2. Apakah faktor-faktor penyebab yang mendorong kerusuhan sosial dan sara tersebut ?

3. Apa latar belakang terjadinya kerusuhan sosial dan sara di Ambon ?

4. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan Polri dalam rangka penegakkan dan menjaga wibawa hukum yang harus ditaati oleh setiap warga khususnya masyarakat Ambon dan Maluku pada umumnya ?

II. DATA DAN FAKTA.

1. Pemberitaan-pemberitaan mass media baik cetak maupun media elektronika bahwa telah terjadi kerusuhan di Dobo (Maluku Tenggara) yang disebabkan karena tindakan pemerasan yang dilakukan oleh Salim Usman (Bugis/Islam) kepada seorang sopir angkutan kota (angkot) Yopi Tuhumeru (Ambon/Kristen) yang akhirnya sampai meluas ke Maluku, Piru (Maluku Tengah) sampai ke Sanana yang telah banyak menelan korban jiwa, harta, tempat ibadah dan lain sebagainya Kasus Ambon terjadi sejak 22 Nopember 1998 hingga saat ini dengan perincian kerugian antara lain :

- a. Korban jiwa : 159 orang meninggal dunia.
- b. Luka berat : 217 orang.
- c. Luka ringan : 209 orang.
- d. Aparat keamanan : 2 orang.
- e. Kerugian materiil : ± Rp.500 milyar (Data laporan Staf Intelijen Polri tanggal 22 Nopember 1998 s/d 26 Juli 1998).

2. Berdasarkan data kependudukan Kodya Ambon (data berdasarkan laporan Penelitian Tim PTIK bekerja sama dengan UI).

- a. Islam : 132.215 jiwa (42,38%).
- b. Kristen dan Protestan : 161.977 jiwa (51,92%).

c. Katolik : 17.315 jiwa (5,55%).

d. Lainnya : 797 jiwa (0,25%).

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan golongan pemeluk agama diantara penduduk propinsi Maluku yang berjumlah 2.088.518 jiwa adalah sebagai berikut :

a. islam : 1.232.433 jiwa (59,01%).

b. Kristen dan Protestan : 757.037 jiwa (35,29%).

c. Katolik : 108.394 jiwa (5,19%).

d. Lainnya : 10.651 jiwa (0,51%).

3. Berdasarkan pengelompokkan golongan agama.

Secara tradisional penduduk Ambon terbagi atas dua golongan utama yaitu yang beragama Islam dan kristen. Sedangkan yang beragama Katolik karena jumlahnya tidak sebanding dengan yang beragama Islam dan Kristen, maka tidak diperhitungkan. Secara pranata gereja Katolik lebih utuh apabila dibandingkan dengan penganut Islam dan Kristen. Penganut Islam dan Kristen masing-masing terdiri atas aliran-aliran dari yang moderat sampai dengan yang fanatik berkenaan dengan keyakinan keagamaan dan hubungannya dengan agama-agama lainnya. Gereja Katolik dalam berbagai konflik mengambil posisi moderat dibandingkan dengan sejumlah kelompok dari aliran yang keras dan ekstrim dari Gereja Protestan dan Umat Islam.

Di daerah pedesaan, warga desa yang menganut agama yang sama cenderung untuk hidup mengelompok, sehingga ada desa-desa yang homogen Islam disebut "Siri-Sori Islam" dan desa-desa yang lain homogen Kristen disebut "siri-Sori Kristen". Sedangkan di kota Ambon pola pengelompokkan kesatuan hidup berdasarkan keyakinan keagamaan seperti yang terjadi di pedesaan memang ada yaitu adanya kampung-kampung yang mayoritas

penduduk beragama Kristen (Kudamati) dan mayoritas yang penduduknya beragama Islam (Batu Merah), sedangkan penduduk agama minoritas bisa hidup mengelompok yang terpencar-pencar dalam satu kehidupan secara individual.

4. Pembagian wilayah kota Ambon dan kebudayaan secara garis besarnya, desa-desa di Ambon dibagi dalam dua wilayah yaitu desa-desa pantai utara di Jazirah Leihitu yang beragama Islam dan Jazirah Leitimor yang beragama Kristen. Pusat kebudayaan Islam di Ambon adalah Hitu, yang merupakan pemukiman tua dengan tradisi-tradisi Islam yang berorientasi ke Jepara (Ada pukul sapu hingga saat ini) merupakan tradisi sebelum abad 21. Sedangkan pusat kebudayaan Kristen adalah beberapa kampung tua di Ambon dan di Soya dan bahkan desa Soya yang terletak di pinggiran kota Ambon mempunyai mitologi yang mengacu ke kerajaan Majapahit (Batu Gajah, Batu Gantung, Batu Meja).

Warga di desa-desa pulau Ambon bagian selatan yang beragama Islam pada umumnya adalah para petani keturunan orang Buton (Sulawesi Tenggara), yang nenek moyangnya telah datang dan bermukim di desa-desa tersebut. Mereka hidup saling tolong menolong dengan sesama warga desa yang orang Ambon asli dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan keagamaan. Sebagian mereka terikat dalam hubungan kekerabatan "Pela-Gandong" dengan sesama warga asal Ambon setempat.

5. Ambon dibawah kekuasaan VOC.

Berdasarkan informasi yang berkembang di kehidupan masyarakat Ambon bahwa sebelum VOC menguasai Ambon, pulau Ambon dikuasai oleh bangsa Portugis karena Ambon terkenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Bangsa Portugis telah menyatu dengan masyarakat Ambon (ter-

lihat dari nama-nama FAM Portugis) dan mendirikan gereja-gereja Katolik Ambon. Selanjutnya VOC datang ke Ambon untuk hal yang sama yaitu berdagang rempah-rempah sehingga terjadi persaingan antara Portugis dan Belanda (VOC). Dalam persaingan tersebut VOC memenangkan persaingan dan Ambon dikuasai VOC sampai para pastor Portugis tidak diperkenankan mengadakan kegiatan keagamaan di Gereja dan digantikan oleh pendeta-pendeta Belanda. Hal tersebut terbukti adanya gereja-gereja Protestan bekas Gereja Katolik dan nama-nama Fam Ambon yang memakai Fam Belanda dan Fam Portugis. Selanjutnya Bangsa Portugis bergeser ke Tenggara sampai Maluku Tenggara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor Timur.

6. Demografi Sosial Kota Ambon.

Jenis suku bangsa ialah Ambon, Lease, Seram, Buru dan Banda dan selanjutnya suku dari Maluku Tenggara dan Maluku Utara. Suku lainnya adalah Jawa, Bugis, Toraja, Buton, Sumatera. Suku pendatang adalah Jawa, Sumatera, Bugis, Makasar, Toraja, Buton, Suku Jawa banyak menjadi pegawai, pejabat tentara sedang suku Bugis, Makasar, Toraja, Buton sebagian pedagang dan tukang kayu (Geografi Budaya Daerah Maluku, 1978).

Secara kependudukan orang-orang Bugis, Buton dan Makasar (BBM) adalah mayoritas dibandingkan dengan penduduk asli asal Ambon baik secara sosial, ekonomi dan budaya adalah "dominan". Mereka menguasai tempat-tempat umum dan pasar sehingga warga masyarakat asal setempat hanya sebagai konsumen dan pengguna jasa. Secara politik lokal dan nasional mereka menguasai berbagai kebijaksanaan penguasaan dan pendistribusian sumber-sumber daya yang ada di Ambon dan Maluku. Bersamaan dengan keberadaan BBM yang dominan tersebut berkembang

dengan mantap stereotif suku bangsa yang dikembangkan oleh pihak-pihak yang dominan dan diterima oleh yang minoritas yaitu "Orang Ambon pemalas, hanya menghabiskan uang dan waktu untuk minum-minum sampai mabok, gengsi tinggi dan tidak mau kerja kasar" (tidak mau jualan, apalagi jualan di kaki lima, tidak mau jadi tukang sapu jalan, tidak mau jadi kuli pengangkut barang, tidak mau jadi tukang becak dan sebagainya), maunya menjadi pegawai negeri atau ABRI walau gaji kecil tetapi gengsi tinggi. Sebaliknya orang-orang BBM adalah pekerja keras dan rajin, mau mengerjakan apa saja dan merekalah yang telah membangun kota Ambon. Tetapi masyarakat Ambon juga mempunyai stereotif mengenai orang BBM yaitu preman dan mafia. Stereotif dan praktek-praktek premanisme dan mafia dari berbagai bentuk kekerasan dan kesewenang-wenangan dari para preman yang memperoleh beking para oknum telah membuat rasa tidak aman merata dan menyeluruh pada waraga Ambon.

III. ANALISIS DAN KAJIAN.

1. Kota Ambon sebagai ibukota propinsi Maluku merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan Maluku, sehingga apa yang terjadi kota Ambon juga akan berpengaruh dan menular (merembet) ke berbagai pelosok desa di daerah Maluku. Begitu pula kasus kerusuhan yang terjadi di Dobo. Kepulauan Aru, Maluku Tenggara pada tanggal 22 Nopember 1998 yang semula hanya perkelahian biasa antar penduduk asli Ambon (beragama Kristen) dengan penduduk pendatang asli Bugis (yang beragama Islam) telah berkembang menjadi kerusuhan SARA dan telah menjalar sampai ke Maluku Tenggara (Tual) dan Maluku Tengah (Piru) kota Ambon dan tempat-

tempat lain di pelosok Maluku hingga saat ini.

Hal ini sangat mengganggu dan mempengaruhi serta merusak sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang selama ini telah berjalan dengan baik di daerah Maluku.

Dari keenam masalah tersebut diatas diduga dapat menjadi salah satu pendorong terjadinya kerusuhan Ambon misalnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan penduduk pendatang lebih dominan dari pada penduduk asli. Ekonomi kota dan kesempatan kerja yang makin tidak seimbang mengakibatkan adanya anggapan atau cap kepada penduduk asli oleh penduduk pendatang bahwa "orang Ambon pemalas hanya menghabiskan uang untuk foya-foya dan minum-minum, mabok-mabokan, gengsi tinggi dan tidak mau kerja kasar", sebaliknya penduduk pendatang khususnya BBM mendapat cap dari penduduk asli sebagai "preman dan mafia". Dari gambaran tersebut jelas antara penduduk asli (Ambon) dengan penduduk pendatang khususnya Buton, Bugis, Makasar (BBM) telah terjadi jarak antara kedua suku tersebut.

Disamping itu dengan adanya penduduk pendatang maka akan dihadapkan kepada lahan untuk pertanian dan sarana sosial lainnya sehingga penduduk asli merasa terganggu misalnya kedatangan orang Jawa yang transmigrasi ke Maluku Tengah (Pulau Seram) dan Pulau Buru yang pada umumnya mereka berhasil membangun dan hidup lebih baik dari penduduk asli yang mengakibatkan kecemburuan sosial tersendiri.

2. Demografi Sosial Kota Ambon.

Kota Ambon sebagai ibukota propinsi Maluku yang terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia mengakibatkan ba-

nyak pendatang-pendatang dari lain daerah untuk mengadu untung di kota Ambon baik sektor formal (pegawai negeri) maupun sektor non formal (wiraswasta), sehingga di kota Ambon antara lain terdapat suku Jawa, Sunda, Nusa Tenggara Timur, Manado dan yang paling dominan adalah Buton, Bugis dan Makasar Toraja karena letak demografinya berdekatan dengan kota Ambon. Akibat adanya pendatang-pendatang baru khususnya dari suku Buton, Bugis dan Makasar serta Toraja dan dihadapkan dengan pulau Ambon yang kecil maka kota Ambon terasa sempit dan mengakibatkan problem sosial tersendiri antara lain :

- a. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang tidak terkendali.
- b. Perumahan rakyat dan sarana fisik dan sosial yang makin tidak memadai.
- c. Lingkungan hidup dan kesehatan yang makin merosot.
- d. Ekonomi kota dan kesempatan kerja yang makin langka.
- e. Lalu lintas dan transportasi yang makin langka.
- f. Organisasi dan manajemen perkotaan yang makin tidak mampu.

(Urbanisasi, Pembangunan dan Kerusakan Kota, Alumni Bandung 1997, Herlianto IR, MTH.)

Dari keenam butir tersebut diatas khususnya butir a, b dan d dimana kita dapat melihat bahwa sekalipun kota Ambon merupakan tumpuan hidup dan pengharapan bagi penduduk asli maupun pendatang dan juga masyarakat, namun hal tersebut harus dibayar cukup mahal dengan adanya kerusakan dan kekerasan yang terjadi di Ambon hingga saat ini mengingat kota Ambon yang digambarkan sebagai kota yang indah "Ambon Manise" dalam kenyataan sebenarnya kota tersebut menyembunyikan banyak potensi konflik

yang siap muncul kepermukaan bila ada pemicunya, dan hal ini telah menjadi kenyataan.

3. Faktor Kehidupan Sosial Kemasyarakatan.

a. Adanya stereotif negatif kepada warga asli kepada warga pendatang dan sebaliknya warga pendatang kepada warga asli antara lain :

1.) Warga pendatang baik Buton, Bugis, Makasar, Jawa, Sunda, Flores dan sebagainya menganggap orang Ambon (Maluku) mempunyai adat kebiasaan yang tidak baik sehingga ada cap/stempel kepada masyarakat Ambon bahwa "orang Ambon itu pemalas, menghabiskan uang dan waktu minum-minum sampai mabuk, gengsi tinggi, tidak mau kerja kasar, maunya jadi pegawai negeri/ABRI walau gaji kecil tetapi gengsi tinggi". Dengan adanya anggapan negatif penduduk pendatang kepada penduduk asli Ambon dengan sendirinya telah ada jarak sosial atau rasa curiga antara penduduk pendatang dengan penduduk asli, memang kalau melihat kebiasaan masyarakat Ambon sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari pada kebiasaan masa lalu dimana Ambon pernah dikuasai oleh Portugis dan Belanda karena rempah-rempahnya sehingga bilamana setelah panen rempah-rempah mereka akan pesta-pesta (dansa regce dan minum-minum) sebagaimana kebiasaan orang Portugis dan Belanda. Mengingat hal tersebut diatas sudah berlangsung begitu lama maka hal tersebut seolah-olah menjadi hal yang biasa atau adat kebiasaan dimana oleh penduduk pendatang yang mayoritas beragama Islam dianggap melanggar agama dan tidak baik. Begitu pula anggapan penduduk asli kepada pendatang, mereka menganggap Ambon kaya akan hasil bumi (rempah-rempah) dan hasil laut sehingga mereka mau datang ke Ambon (Maluku). Diantara penduduk pen-

datang memang banyak yang dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan Ambon dan Maluku pada umumnya dan membangun bersama-sama wilayah Ambon sehingga terjalin hubungan kekerabatan antara penduduk asli dengan warga pendatang. Dan sebagian penduduk pendatang ada yang tidak berhasil di daerah Ambon dan Maluku sehingga mereka melakukan apa saja untuk melanjutkan kehidupannya sehingga ada yang menjadi penjahat, pemeras, pekerja kasar, tukang becak sehingga orang Ambon menganggap penduduk pendatang adalah preman dan mafia.

2.) Stereotif dan praktek-praktek premanisme dan mafia dari berbagai bentuk kekerasan dan kesewenang-wenangan dari para preman dan mafia yang memperoleh beking para oknum-oknum tersebut telah membuat rasa tidak aman secara merata dan menyeluruh pada warga asli Ambon yang pada akhirnya tidak bisa berbuat sesuatu dan harus mencrime kenyataan tersebut. Anggapan-anggapan atau adanya stereotif-stereotif negatif antar penduduk asli dan warga pendatang tersebut diatas telah membuat jarak dan rasa curiga mencurigai diantara kelompok-kelompok masyarakat tersebut yang dapat mengakibatkan adanya disintegrasi sosial.

b. Adanya Tradisi Pela Gandong.

Masyarakat pulau Ambon dan pulau-pulau Lease disekitarnya telah berabad-abad memegang tradisi kema-jemukan didalam menata kehi-dupannya. Perbedaan konflik dan kerja sama adalah merupakan tradisi mereka yang lebih mementingkan persatuan dan kesatuan yaitu persatuan berdasarkan atas hubungan keluarga atau hubungan darah (dengan adanya fam) serta berdasarkan sistim kekerabatan maupun hubungan darah yang bersifat fiktif yang terwujud melalui upa-

cara pengangkatan saudara atau "Pela". Dalam tradisi tersebut, perbedaan-perbedaan dijumpai oleh penggunaan idiom saudara sedarah atau saudara sekandung (pela gandong), serta berbagai bentuk pela lainnya. Secara tradisional dengan adanya tradisi sebuah masyarakat desa setidaknya-tidaknya mempunyai hubungan kekerabatan pula dengan sebuah masyarakat desa lainnya.

Semakin banyak sebuah masyarakat desa mempunyai hubungan pela dengan masyarakat desa lainnya, maka semakin mantap kehidupan masyarakat tersebut dan akan semakin terhindar dari berbagai konflik dan serangan yang dilakukan oleh desa-desa yang menjadi pasangan pelanya, karena mereka telah bersepakat untuk tidak saling menyerang, tetapi sebaliknya saling membantu dan saling melindungi diantara mereka tanpa melihat asal-usul, suku dan agamanya. Masing-masing mempunyai hak budayanya sendiri, yaitu sebuah hak untuk mengatur kehidupannya dengan berpedoman pada kebudayaan atau adat dan keyakinan keagamaan masing-masing. Sebagaimana telah digambarkan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, "Adat Istiadat Daerah Maluku, Jakarta 1978". ("Upacara keagamaan ini adalah hari Jumat untuk mereka yang beragama Islam dan hari Minggu yang beragama Kristen Protestan atau hari Sabtu bagi mereka yang beragama Kristen Advent. Setiap orang diberi hak dan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya. Toleransi beragama sangat baik dan patut dipelihara dan dipertahankan terhadap kemungkinan adanya pengaruh luar yang ingin menghancurkannya").

c. Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Agama.

Secara tradisional penduduk Maluku terbagi atas 2 (dua) golongan besar

agama yaitu agama Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Maluku Utara dan Maluku Tengah dan agama Kristen Protestan dan Katolik yang dipeluk oleh mayoritas penduduk pulau Ambon dan Maluku Tenggara.

Sedangkan penduduk Ambon dan Pulau Lease di daerah pedesaan, warga desa yang memeluk agama yang sama cenderung untuk hidup mengelompok sehingga ada desa-desa yang homogen Islam disebut "Siri-Sori Islam" dan desa-desa lainnya yang homogen Kristen disebut "Siri-Sori Kristen". Sedangkan di kota Ambon pengelompokan kesatuan hidup berdasarkan agama juga ada dimana kampung-kampung (kelurahan) yang mayoritas penduduknya beragama Kristen (Kudamati, Soya, Batu Gajah, Silale) dan mayoritas penduduknya beragama Islam (Batu Merah), sedangkan penduduk agama minoritas bisa hidup mengelompok yang terpecah-pecah dalam satu kehidupan secara individual.

Sedangkan berdasarkan pembagian wilayah pulau Ambon dibagi menjadi 2 (dua) wilayah budaya yaitu desa-desa pantai utara di Jazirah Leihitu yang beragama Islam dengan pengaruh adatnya yang Islam dengan Jazirah Leitimor yang beragama Kristen dengan adat istiadat yang Kristen.

Dengan adanya pengelompokan daerah, wilayah dan desa-desa berdasarkan agama tersebut ada segi positifnya dalam arti dalam melaksanakan ibadah sesuai agamanya tidak ada saling mengganggu, namun ada juga segi negatifnya, yaitu masyarakatnya homogen sesuai agamanya, bisa menimbulkan fanatisme sempit yang mudah terprovokasi dan tersulut mengarah kepada peristiwa SARA.

d. Adanya Pengaruh dari Kejadian-Kejadian Sebelumnya.

Sebelum kejadian kerusuhan Ambon

terjadi, telah terjadi kerusuhan dan kejadian-kejadian yang berbau SARA antara lain, Kasus Probolinggo, Kasus Jember, Kasus Banyuwangi dan Kasus Ketapang Jakarta, dimana umat Kristen di daerah tersebut adalah warga minoritas dan banyak tempat-tempat ibadahnya (gereja) banyak yang musnah terbakar. Dari kejadian tersebut muncul Kasus Kupang dimana rumah penduduk yang beragama Islam dan masjid telah dibakar oleh mayoritas penduduk yang beragama Kristen. Namun kasus-kasus tersebut akhirnya dapat diselesaikan dan didamaikan oleh para pemimpin umat Islam dan Kristen yang turun ke daerah dan pembangunan tempat-tempat ibadah (Masjid dan Gereja) yang dibangun secara gotong royong antara umat Islam dan Kristen.

e. Adanya Politik Golongan.

Dalam sejarahnya setelah kemerdekaan, Maluku diperintah oleh Gubernur yang beragama Kristen hanya satu kali (Gubernur pertama, Latumahina) selanjutnya Maluku dipimpin oleh Gubernur secara bergantian mulai dari orang Sunda (Gubernur Sanusi, beragama Islam), orang Jawa (Gubernur Sukoso, beragama Katolik) dan orang Maluku Ambon asli dari Pulau Lease/Pelauw (Akib Matukonsina) dan Gubernur yang sekarang Saleh Latukonsina berasal dari fam yang sama dengan Gubernur pendahulunya dan berasal dari golongan muslim.

Masih dalam ingatan kita bahwa dalam rangka pencalonan gubernur yang sekarang (Saleh Latukonsina) telah terjadi gelombang protes dan penolakan dari golongan Kristen atas pencalonannya yang telah mendukung salah satu calon yang beragama Kristen. Sedangkan di pihak lain, golongan muslim juga telah melakukan protes terhadap calon yang beragama Kris-

ten dan menyalurkan dukungannya kepada Saleh Latukonsina yang beragama Islam. Selanjutnya pemerintah pusat memutuskan Saleh Latukonsina sebagai Gubernur Maluku menggantikan Akib Latukonsina. Dengan demikian pada pencalonan gubernur Maluku yang sekarang telah terjadi pula demonstrasi dan protes dan pernyataan saling dukungan dari golongan Kristen kepada calon gubernur yang beragama Kristen dan golongan Muslim kepada calon gubernur yang beragama Muslim, dengan demikian sudah nampak adanya unsur SARA didalam pencalonan gubernur. Hal tersebut diduga oleh kelompok Kristen sebagai kegagalan dan kekalahan kelompok Kristen yang mayoritas di Ambon terhadap golongan Muslim.

Disamping itu berdasarkan informasi, bahwa Gubernur Akib Latukonsina selama menjabat Gubernur banyak mengganti pejabat-pejabat kewilayahan yang beragama Kristen digantikan pejabat lain yang beragama Islam dengan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dengan pemerintah pusat, sehingga masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Kristen menjadi antipati dan tidak senang dengan gubernurnya hingga pencalonan gubernur yang sekarang. Hal tersebut dianggap sebagai praktek Politik Golongan.

f. Ketidakmampuan dan Antisipasi Aparat Dalam Mengatasi Masalah.

a. Kerusuhan Ambon/Maluku bermula dari kejadian pada tanggal 15 Januari 1999 di Galai Kecamatan Dobo yang disebabkan karena pemerasan yang dilakukan oleh Salim Usman (suku Bugis/Islam) terhadap sopir angkutan umum Yopi Tuhumeru (suku Ambon/Kristen) yang mengakibatkan perkelahian diantara kedua orang tersebut, sehingga masalah yang pada dasarnya bermula dari persoalan pribadi

(perorangan), hanya karena perbedaan suku dan perbedaan agama. Ada dugaan kasus pribadi tersebut karena tidak ditangani oleh aparat secara tuntas, maka berkembang menjadi perkelahian antar kelompok dan berlanjut menjadi perkelahian antar Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan yang melibatkan penduduk dan masyarakat setempat yang berada di Dobo Maluku Tenggara.

b. Karena kurang adanya antisipasi aparat Kasus Dobo agar tidak meluas ke daerah lainnya maka masalah tersebut akhirnya meluas juga sampai ke daerah Tual, Ambon, Maluku Tengah dan Maluku Utara apalagi sebelumnya sudah ada indikasi dan tanda-tanda ketidakharmonisan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang karena adanya sentimen/kecemburuan sosial, ekonomi diantara mereka yang sudah lama terpendam sehingga mudah dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sehingga dapat meluas menjadi kerusuhan masal dan telah banyak memakan korban jiwa, harta benda dan lain-lainnya.

c. Dengan meluasnya Kasus Kerusuhan Ambon/Maluku yang hingga saat ini dirasa belum ada tanda-tanda untuk mereda aparat kepolisian telah melakukan upaya-upaya penyidikan dan pihak keamanan telah melakukan tindakan keras lainnya namun sudah dianggap tidak mampu berbuat banyak apalagi ada tuduhan aparat sudah memihak kepada masing-masing kelompok sesuai agamanya maka kasus Ambon makin tidak menentu sampai kapan akan selesai.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN.

1. Kesimpulan.

a. Kasus Ambon/Maluku bersumber dari persoalan pribadi yang disebabkan oleh pemerasan yang dilakukan oleh Salim Usman (suku Bugis/Islam) terhadap sopir

angkutan kota Yopi Tuhumeru (suku Ambon/Kristen). Hal ini sejalan dengan anggapan negatif penduduk asli (Ambon/Maluku) kepada masyarakat pendatang (urban) khususnya suku Bugis, Buton dan Makasar mereka adalah "Preman dan Mafia" yang perlu untuk dilawan karena telah mengganggu ketentraman dan keamanannya.

b. Karena adanya pengaruh urbanisasi dan perkembangan kota yang tidak terkendali sehingga masyarakat pendatang (urban) lebih dominan dalam perkembangan pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial, budaya sehingga seolah-olah ada klaim bahwa masyarakat pendatanglah yang telah membangun kota Ambon. Sehingga timbul anggapan negatif dari masyarakat urban terhadap penduduk asli bahwa "orang Ambon adalah pemalas, suka mabuk-mabuk, hanya bisa menghabiskan uang (foya-foya), tidak mau kerja kasar", dan lainnya, sehingga timbul kebencian dan dendam penduduk asli kepada penduduk pendatang (urban) khususnya masyarakat Bugis, Buton dan Makasar.

c. Adanya kecemburuan sosial dimana penduduk pendatang lebih berhasil dibidang kehidupan ekonomi dan perniagaan, sedangkan penduduk asli hanya sebagai konsumen dengan mengandalkan pendapatan dan hasil berkebun buah-buahan dan rempah-rempah sehingga masyarakat pendatang lebih banyak mendiami perkotaan sedangkan penduduk asli menempati daerah pegunungan dan perbukitan.

d. Adanya wilayah-wilayah yang ditempati oleh penduduk yang homogenitasnya (mayoritasnya) beragama Islam dan yang homogenitasnya(mayoritasnya) beragama Kristen sehingga apabila terjadi konflik golongan akan lebih mudah berkembang menjadi kerusuhan sosial dan mengarah kepada kasus SARA.

e. Adanya budaya "Pela Gandong" sebagai sarana pemersatu dan pengangkatan saudara sekandung antar penduduk asli dan penduduk pendatang yang pernah mengalami konflik antar daerah atau antar golongan tidak mampu mengatasi masalah kerusuhan Ambon karena budaya "Pela Gandong" tidak berlaku bagi mereka yang bertikai tetapi hanya berlaku bagi mereka yang telah membuat kesepakatan Pela Gandong.

f. Upaya represif dengan melakukan tindakan penyidikan ternyata tidak menunjukkan tanda-tanda kasus kerusuhan Ambon akan mereda. Begitu pula pada saat pemberlakuan darurat militer dan tembak ditempat bagi para perusuh ternyata hanya bisa mengatasi sesaat, namun setelah pasukan ditarik kembali ke darurat sipil, kerusuhan kembali terjadi. Hingga saat ini telah banyak memakan korban jiwa, harta benda dan kehormatan sebagai bangsa.

2. Saran-Saran.

a. Kasus Ambon/Maluku perlu ditarik ke tingkat Pusat dengan melibatkan unsur-unsur Depdagri, Dephankam, Depsosial dan DepAgama dalam masalah kerusuhan Ambon yang begitu kompleks dan perlu melibatkan berbagai departemen untuk mengatasinya.

b. Perlu inisiatif dari Kapolri untuk mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan KWI (Komite Wali Gereja Indonesia) untuk bersama-sama turun lapangan dalam upaya memperluas budaya "Pela Gandong" antara golongan Muslim dan golongan Kristen mengingat sudah terbentuknya Posko Al-fatah untuk golongan Muslim dan Posko Maranatha untuk golongan Kristen, sehingga para ulama, pendeta dan pastor dapat menghubungi para tokoh-tokoh dari posko masing-masing untuk membuat kesepakatan

an dan perdamaian.

c. Untuk pimpinan daerah Maluku maupun Polres-Polresnya seyogyanya dijabat oleh pejabat dari golongan netral termasuk dari suku dan agama tidak saling bertikai, dapat diterima oleh semua pihak baik golongan Kristen maupun golongan Islam dan masyarakat pada umumnya.

d. Untuk upaya penyekatan dan penjagaan kepada masing-masing pihak yang bertikai perlu pengiriman pasukan yang cukup, mengingat Ambon/Maluku terdiri dari pulau-pulau dan laut, serta terdiri dari pasukan yang betul-betul netral, mengingat tugasnya yang begitu luas dan sangat kompleks.

e. Upaya penegakan hukum dan penyidikan harus tetap dilanjutkan demi wibawa dan tegaknya hukum di Ambon dan negara Kesatuan Republik Indonesia.



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT ADMINISTRASI PERSONEL
Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

SEBUTAN PANGKAT ANGGOTA POLRI

Skep Kapolri No. Pol. : Skep/01/I/2001 tanggal 01-01-2001
 Berlaku TMT 01 Januari 2001

No	LAMA	Skep/001/VI/2000 TMT 01-07-2000	Skep/ 01 / I /2001 TMT 01-01-2001	SKT
1.	JEND. POL	JEND POL	JENDERAL POLISI	JEND POL
2.	LETJEN POL	KOMJEN POL	KOMISARIS JENDERAL POLISI	KOMJEN POL
3.	MAYJEN POL	IRJEN POL	INSPEKTUR JENDERAL POLISI	IRJEN POL
4.	BRIGJEN POL	BRIGJEN POL	BRIGADIR JENDERAL POLISI	BRIGJEN POL
5.	KOL POL	SR SUPT	KOMISARIS BESAR POLISI	KOMBES POL
6.	LETKOL POL	SUPT	AJUN KOMISARIS BESAR POLISI	AKBP
7.	MAYOR POL	ASS SUPT	KOMISARIS POLISI	KOMPOL
8.	KAPTEN POL	SR INSP POL	AJUN KOMISARIS POLISI	AKP
9.	LETTU POL	IPTU	INSPEKTUR POLISI SATU	IPTU
10.	LETDA POL	IPDA	INSPEKTUR POLISI DUA	IPDA
11.	PELTU	AIPTU	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU	AIPTU
12.	PELDA	AIPDA	AJUN INSPEKTUR POLISI DUA	AIPDA
13.	SERMA	SERMA POL	BRIGADIR POLISI KEPALA	BRIPKA
14.	SERKA	SERKA POL	BRIGADIR POLISI	BRIGADIR
15.	SERTU	SERTU POL	BRIGADIR POLISI SATU	BRIP1TU
16.	SERDA	SERDA POL	BRIGADIR POLISI DUA	BRIPDA
17.	KOPKA	BHARUTU	AJUN BRIGADIR POLISI	ABRIP
18.	KOPTU	BHARUDA	AJUN BRIGADIR POLISI SATU	ABRIP1TU
19.	KOPDA	BHARUMUD	AJUN BRIGADIR POLISI DUA	ABRIPDA
20.	BHARAKA	BHARAKA	BHAYANGKARA KEPALA	BHARAKA
21.	BHARATU	BHARATU	BHAYANGKARA SATU	BHARATU
22.	BHARADA	BHARADA	BHAYANGKARA DUA	BHARADA

Jakarta, 02 Januari 2001

DIREKTUR ADMINISTRASI PERSONEL POLRI



DIREKTUR
 Drs. BUDI UTOMO
 BRIGADIR JENDERAL POLISI